



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABIDIN NASYAR**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **664522**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **852.700.000**

1. Tanah Seluas 1515 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 72.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/29 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 805 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 20.125.000
4. Tanah Seluas 4334 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 108.350.000
5. Tanah Seluas 1615 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 40.375.000
6. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 38.250.000
7. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 6472 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 323.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **36.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	894.200.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	894.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.